

ABSTRAK

Nama : Mohammad Kemal Dermawan
Program Studi : Sosiologi
Judul : **POTENSI PEMOLISIAN KOMUNITAS PADA MASYARAKAT PERKOTAAN: Suatu Kajian Dari Aspek Kapasitas Komunitas, Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Pengawasan Sipil**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi Pemolisian Komunitas dilihat dari aspek potensi kemitraan, prinsip-prinsip demokratis dan mekanisme pengawasan sipil. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan potensi terciptanya kemitraan yang harmonis antara Polisi dengan Masyarakat dalam program Pemolisian Komunitas, prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks keberadaan Pemolisian Komunitas telah dilakukan POLRI dalam menunjang keberhasilan penerapan program Pemolisian Komunitas serta mekanisme pengawasan sipil terhadap program Pemolisian Komunitas yang dijalankan oleh POLRI?

Fokus penelitian Disertasi ini mencakup dua tataran perhatian. **Pertama** tataran kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, regulasi dalam konteks demokrasi pada program Pemolisian Komunitas. **Kedua**, tataran empiris tentang peran kapasitas komunitas terhadap program Pemolisian Komunitas.

Penelitian Disertasi ini menggunakan model desain dominan – kurang dominan. Dalam desain ini peneliti menyajikan penelitian dalam sebuah paradigma dominan tunggal dengan satu komponen kecil penelitian secara keseluruhan yang disusun dari paradigma alternatif. Pendekatan ini adalah studi kuantitatif yang dengan bagian wawancara kualitatif kecil pada tahap pengumpulan data. Keuntungan pendekatan ini adalah menyajikan satu gambaran paradigma yang konsisten dalam penelitian dan tetap mengumpulkan informasi terbatas untuk meneliti aspek penelitian secara mendalam.

Dengan metode yang demikian maka penulis dapat lebih memperoleh gambaran tentang tataran kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, regulasi dalam konteks demokrasi pada program Pemolisian Komunitas dan tataran empiris tentang peran kapasitas komunitas terhadap program Pemolisian Komunitas, khususnya kemitraan polisi dan masyarakat yang mencakup pula bagaimana masyarakat menilai keberlakuan prinsip-prinsip demokratis oleh POLRI, mekanisme pengawasan sipil serta relasi kekuasaan antara polisi dan komunitas dalam kehidupan sehari-hari.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Morino tentang Prinsip-prinsip Demokrasi dan Teori Caparini tentang Pengawasan Sipil untuk menjelaskan Tataran kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, regulasi dalam konteks demokrasi pada program Pemolisian Komunitas serta teori-teori tentang Hubungan Kekuasaan, Kapasitas Komunitas, Pertukaran Sosial, Karakteristik Kemitraan untuk menjelaskan Tataran empiris tentang peran kapasitas komunitas terhadap program Pemolisian Komunitas.

Lokasi penelitian ini adalah permukiman *Real estate* dan *Non Real estate* di Bekasi dan Depok. Karena penelitian disertasi ini juga melihat potensi pelaksanaan Pemolisian Komunitas di dalam komunitas dengan kelas sosial yang berbeda maka pemilihan permukiman *real estate* dan *non real estate* ditetapkan untuk mewakili komunitas yang lebih mapan (tingkat sosial-ekonomi, dalam hal ini diwakili oleh komunitas permukiman *real estate*) dan komunitas yang kurang mapan (tingkat sosial-ekonomi, dalam hal ini diwakili oleh komunitas permukiman *non real estate*).

Dari kondisi empiris Tataran kebijakan yang melingkupi implementasi Pemolisian Komunitas terlihat bahwa (1) Aturan Perundang-undangan termasuk pula kebijakan-kebijakan yang berpijak pada Paradigma Baru POLRI/Reformasi POLRI sudah memadai; (2) terkait dengan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam Pemolisian Komunitas, ternyata masih terdapat beberapa masalah seperti (a) belum terumuskannya mekanisme kemitraan yang lebih partisipatif; (b) belum diperolehnya pemahaman yang baik tentang formasi dan stratifikasi kelas-kelas sosial dan gender; (c) belum maksimalnya faktor pendorong dan fasilitasi kebijakan-kebijakan bagi prakarsa, inisiatif dan gagasan yang muncul dari polisi lokal/ setempat; terkait dengan pelaksanaan pengawasan sipil terhadap POLRI dan tindakan pemolisiannya, ternyata masih terdapat beberapa masalah seperti (a) belum berjalan mekanisme pengawasan sipil dengan baik, khususnya pengawasan terhadap Polri dan tindakan pemolisiannya; (b) belum ada lembaga pengawasan yang efektif baik lembaga pengawasan bentukan Undang-Undang maupun bentukan masyarakat.

Dari kondisi empiris Tataran Empiris, yakni relasi POLRI dan Komunitas dalam Pemolisian Komunitas, diperoleh data bahwa (a) kondisi Kapasitas Komunitas secara umum mendukung kemitraan serta siap dikembangkan bagi kepentingan menyambut program dari luar yang bermanfaat bagi mereka; (b) belum terciptanya Kemitraan yang setara antara POLRI dan Komunitas karena POLRI lebih mendominasi sejak Pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan FKPM hingga Realisasi FKPM; (c) muncul tiga pihak dalam relasi kemitraan yang kemudian memunculkan relasi kekuasaan tiga pihak : POLRI-FKPM-Komunitas. Hal ini kemudian menjadi hambatan bagi terciptanya partisipasi kolektif warga komunitas dalam bermitra dengan Polri demi tercapainya upaya-upaya penyelenggaraan kamtibmas di dalam komunitas secara kolektif.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan Pemolisian Komunitas yang ditemui dalam penelitian Disertasi ini tersebut, secara umum tidak menghambat potensi keberhasilan program Pemolisian Komunitas di masa yang akan datang. Beberapa perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan hal-hal yang terkait dengan kendala-kendala tersebut harus dilakukan dan mendapat perhatian yang seksama oleh pelaksana program Pemolisian Komunitas.

Kata Kunci:

Pemolisian Komunitas, Kapasitas Komunitas, Prinsip-prinsip Demokrasi, Pengawasan Sipil, Tataran Kebijakan, Tataran Empiris.

ABSTRACT

Nama : Mohammad Kemal Dermawan
Program Studi : Sosiologi
Judul : **THE POTENTIAL OF CREATING THE COMMUNITY POLICING IN URBAN COMMUNITY:
A Lesson From Community Capacity Aspect, The Democratic Principals And The Civil Oversight**

The purpose of the research, in general, is to understand the potential of the Community Policing from partnership potential aspect, the democratic principals and the civil monitoring mechanism. In more specific way, it explains the potential of harmonic partnership between Police Officer and Community regarding the Community Policing program, the democratic principles in the contexts of the Community Policing existents done by POLRI to support the implementation of the Community Policing program and the mechanism of civil oversight upon the Community Policing program by POLRI.

There are two levels of interests to be focused in the Dissertation. First, policies, laws and regulations level in the democratic contexts in the Community Policing program. Second, empirical level about the community capacity role to support the Community Policing program.

The Dissertation use the dominant – less dominant design model. The researcher, in this design, is offering the single dominant paradigm with one small research components as a whole which formed by alternative paradigm. The research approach use a quantitative study with a small part of qualitative interview in the data collection. The advantage of this approachment is to present a view of consistent paradigm in the research and keep on collecting limited information to deeply analyze the research aspects.

Moreover, with these methods, the writer is able to get the description of policies, laws and regulations level in the democratic contexts regsrding the Community Policing program, and the empirical level about the community capacity role in the Community Policing program, specifically, in the partnership between Police and community including the way the community values the democratic principals application by POLRI, civil monitoring mechanism and the power relation between Police and community in ordinary lives.

The writer use the Morino Theory about the Democratic Principals, and also the Caparini Theory about the Civil monitoring to explain the policies, laws and regulations level in the democratic contexts upon the Community Policing. The writer also use theories of Power Relation, Community Capacity, Social Exchange, Partnership Characteristic to explain the Empirical Level about the community capacity in Community Policing program.

Real estate and *Non Real estate* settlement community in Bekasi and Depok are the research location for the Dissertation. The reason to choose the *Real estate* and *Non Real estate* settlement is to shown the representation the

stable community (social economy class, represented by *Real estate* housing community) and less stable community (social economy class, represented by Non *Real estate* housing community).

From the empirical policy level that contains Community Policing implementation, we are able to view that: (1) The laws, including the policies that stand on the new paradigm of POLRI/the reformation of POLRI, has adequated; (2) there are still some problems in the democratic principles implementation in Community Policing, which are (a) the more participative partnership has not been fully explainable, (b) the social class and gender formation and stratification has not been fully understandable, (c) the supporting factors and policies facility for action, initiative, and ideas that come up from the local Police regarding the implementation of civil monitoring to POLRI and their Policing action has not been maximized. There are a few problems regarding this factor, such as: (a) the civil monitoring mechanism has not been successfully implemented, especially the monitoring to POLRI and their Policing action, (b) there has no effective oversight institution, either made by law or community.

The data shown from the empirical condition at the Empirical Level, regarding POLRI relation with community in community policing, in general, the Community Capacity Condition is ready to support the partnership program and ready to be developed to accept any other intentional program from the outside community that might benefit them. Unequal relationship between community and Police, are caused more by the domination of Police since the begining of FKPM development by the early comitee, until the real activity is running. Since the program is started, there was 3 parties in the partnership relation, that then emerges into 3 power relationships; POLRI-FKPM-Community. Such condition become the barrier for collective participation among community member to become Polri partner on achieving collective activity in community security and order program.

Some problem found in this Dissertation research regarding the Community Policing implementation, basicly are not an obstacle for the successful Community Policing program in the future. Nevertheless, some improvement need to be done regarding all the problems, and should be the point of attention to all subjects in Community Policing program.

Key words:

Community Policing, Community Capacity, Democratic Principles, Civil Monitoring, Policy Level, Empirical Level.